

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

KLHK Teliti Kondisi Monas

KLHK meneliti dampak lingkungan akibat proyek revitalisasi kawasan Monas yang dinilai menyalahi prosedur. Jika ada kerusakan, sanksi tegas bisa dikenakan kepada pihak terkait.

JAKARTA, KOMPAS — Penelitian dampak lingkungan pembangunan kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga merupakan salah satu anggota Komisi Pengarah Taman Medan Merdeka.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan, pembangunan dan pengelolaan kawasan Medan Merdeka, termasuk di dalamnya Monas, harus disesuaikan dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta. Keppres itu mengatur, pengelolaan kawasan Medan Merdeka dilakukan oleh Komisi Pengarah yang diketuai Mensesneg dan Badan Pelaksana yang diketuai Gubernur DKI Jakarta.

"KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) masuk untuk melihat pekerjaan fisik yang sudah menembang pohon itu dari aspek lingkungan. Juga sedang didalami secara keahlian dalam kaitannya dengan apakah ini masuk kepada kerusakan lingkungan," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Komisi Pengarah Taman Medan Merdeka, sebelumnya, memerintahkan Gubernur DKI Anies Baswedan selaku pemimpin Badan Pelaksana untuk menghentikan pekerjaan revitalisasi kawasan Monas. Alasannya, revitalisasi belum melalui persetujuan Komisi Pengarah.

Selain cacat prosedural, Komisi Pengarah juga mengkhawatirkan dampak lingkungan dari revitalisasi. Sebab, dilaporkan sudah 191 pohon ditebang selama pekerjaan fisik revitalisasi kawasan Monas dilakukan.

Untuk itu, menurut Siti Nurbaya, tim dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai meneliti perencanaan lingkungan proyek revitalisasi. "Mereka su-

dah turun ke lapangan untuk melihat izin kegiatan yang direncanakan untuk revitalisasi Monas itu dalam kegiatan apa. Ada atau enggak pemberituannya, ada atau enggak mekanisme perencanaan lingkungannya," tuturnya.

Jika dari hasil penelitian ditemukan bukti perencanaan lingkungan bermasalah, semua yang terlibat dalam revitalisasi bisa terkena sanksi.

Dihentikan

Proyek revitalisasi kawasan Monas dikerjakan tidak sesuai dengan desain hasil sayembara. Proyek tersebut kini disepakati diberhentikan sementara sampai izin dikeluarkan oleh Mensesneg.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengakui, Pemerintah Provinsi DKI telah memodifikasi hasil pemenang sayembara revitalisasi Monas. Sejumlah modifikasi yang dilakukan adalah pembangunan jalan di tepi pagar dan tribun bak amfiteater.

"Plaza Selatan saja yang kami kerjakan, yang lain tak ada perubahan. Kami telah laporkan (ke Ketua Komite) tentang desain ini seluruhnya," ujar Saefullah seusai meninjau pengerjaan proyek tersebut bersama pimpinan DPRD DKI, Selasa kemarin.

Pengerjaan proyek itu sudah mencapai 88 persen. Di kawasan proyek, tanah juga mulai dibeton. Berdasarkan rencana, pelataran sisi selatan Monas itu akan dibangun plaza upacara dan kolam.

Saefullah menjelaskan, proyek tak mungkin diberhentikan secara total karena pengerjaan hampir selesai. "Kalau dibiarkan mangkrak seperti ini, saya rasa kurang elok. Semoga dalam waktu dekat ada surat balasan dari Mensesneg," tutur Saefullah.

DPRD DKI menggelar rapat tertutup dengan

eksekutif selama sekitar dua jam, kemarin, terkait proyek Monas ini.

Dari eksekutif hadir Asisten

Pembangunan

dan Lingkungan Hidup DKI Yusmada Faizal serta Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Heru Hermawanto. Dari DPRD DKI, seluruh pimpinan dan ketua fraksi hadir.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pihaknya telah merekomendasikan penghentian sementara proyek Monas mulai Rabu (29/1) kepada Pemprov DKI sampai izin dikeluarkan oleh Mensesneg.

Mensesneg Pratikno mengatakan, Gubernur DKI Anies Baswedan belum mengirim surat kepada Mensesneg terkait izin revitalisasi Monas. Sejauh ini, permohonan izin dari DKI Jakarta hanya sebatas proyek moda raya terpadu (MRT) dan penyelenggaraan Formula E.

"Gubernur DKI mengirim surat hanya untuk izin pembuatan stasiun MRT di sekitar kawasan Monas dan izin pelaksanaan Formula E yang masih kami bahas. Sementara untuk revitalisasi kawasan Monas, belum ada surat yang dikirim dan ada proses yang tidak terpenuhi," katanya.

Pratikno menjelaskan, Komisi Pengarah akan segera mengadakan rapat dengan sejumlah pemangku kepentingan, seperti Gubernur DKI Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tak sesuai rancangan

Deddy Wahjudi, arsitek pemenang sayembara desain revitalisasi kawasan Monas, menjelaskan, rancangan yang ia buat merespons kondisi yang ada dan perkembangan masterplan kawasan. Justru dalam rancangannya, ia ingin menambah kawasan ruang terbuka hijau, yaitu dengan mengubah kawa-

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

KLHK Teliti Kondisi Monas

san parkir sekarang, yaitu di IRTI, menjadi kawasan hijau.

"Kalau ada bangunan-bangunan baru yang ditambahkan dalam desain, seperti Plaza Aspirasi, Plaza Seni Budaya, itu menggunakan area perkerasan yang sudah ada," ujarnya.

Desain revitalisasi yang ia buat juga merespons dinamika kawasan Taman Medan Merdeka di masa depan. Khususnya di sebelah barat, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat, akan ada Stasiun MRT Monas. Lalu di sebelah timur, Stasiun Gambir akan dikelola sebagai stasiun dalam kota, bukan stasiun untuk kereta antarkota.

Dengan begitu, revitalisasi kawasan Monas akan memberikan aksesibilitas kepada pengunjung. Pengunjung akan memasuki kawasan Monas tidak dengan kendaraan pribadi, tetapi dengan kendaraan umum.

Dalam merancang kawasan tersebut, Deddy mengatakan, ia merancang secara keseluruhan. Itu sebabnya, dalam proses revitalisasi ini, ia mengajak masyarakat untuk melihat secara keseluruhan kawasan seluas 80 hektar, bukan hanya di Plaza Selatan.

Di DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pimpinan dan anggota Komisi II DPR turut mengkritik soal kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait proyek revitalisasi Monas.

"Padahal, Kantor Kemsetneg dan Balai Kota lokasinya berdekatan. Namun, koordinasi tidak berjalan dengan baik. Kami juga meminta agar kekaduahan di publik jangan terjadi lagi," kata Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PPP Arwani Thomafi.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Nasdem Saan Mustopa menambahkan, kawasan Monas merupakan wilayah yang harus dijaga oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Oleh sebab itu, sebaiknya Pemprov DKI Jakarta berizin terlebih dahulu dengan pemerintah pusat sebelum merevitalisasi kawasan Monas.

(NTA/BOW/HLN/DVD)